



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa untuk mengelola/memanajemen risiko yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR TENTANG TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianjar Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pemilik Risiko
2. Pengelola Risiko
3. Unit Manajemen Risiko
4. Unit Pengawas Manajemen Risiko

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kewenangan masing-masing.

Pemilik Risiko memiliki tugas:

- a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
- b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- c. menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;
- d. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan
- e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

2. Pengelola Risiko

Pengelola Risiko memiliki tugas:

- a. mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
- b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
- c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

3. Unit Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko memiliki tugas:

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- c. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit Pemilik Risiko;
  - d. menyusun laporan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko; dan
  - e. memvalidasi usulan Risiko baru dari unit Pemilik Risiko.
4. Unit Pengawas Manajemen Risiko

Unit Pengawas Manajemen Risiko memiliki tugas:

- a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
- c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko Kunci;
- d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko Kunci; dan
- e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENYELENGGARAAN  
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GIANYAR TAHUN 2026

TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2026

| NO. | NAMA                         | JABATAN KEDINASAN                                      | JABATAN DALAM TIM                      |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                            | 3                                                      | 4                                      |
| 1.  | I Wayan Mura                 | Ketua KPU Kabupaten Gianyar                            | Pemilik Risiko                         |
| 2.  | Dewa Ngakan Nyoman Suardita  | Anggota KPU Kabupaten Gianyar                          | Kepala Unit Manajemen Risiko           |
| 3.  | Gusti Bagus Agung Swandhita  | Anggota KPU Kabupaten Gianyar                          | Wakil Unit Manajemen Risiko            |
| 4.  | I Kadek Agus Mudita          | Anggota KPU Kabupaten Gianyar                          | Kepala Unit Pengawas Manajemen Risiko  |
| 5.  | Ni Made Suniari Siartikawati | Anggota KPU Kabupaten Gianyar                          | Wakil Unit Pengawas Manajemen Risiko   |
| 6.  | I Gede Angga Pradhana        | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar                  | Pemilik Risiko                         |
| 7.  | Agus Dian Juliharta          | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator Pengelola Risiko           |
| 8.  | I Gede Angga Pradhana        | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik           | Anggota Pengelola Risiko               |
| 9.  | I Nyoman Danan Jaya          | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi        | Anggota Unit Manajemen Risiko          |
| 10. | Ni Putu Sri Krisnawati       | Kepala Sub Parmas dan SDM                              | Anggota Unit Manajemen Risiko          |
| 11. | I Nengah Kariana             | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama              | Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko |
| 12. | Putu Yudi Sumaryani          | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama              | Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko |
| 13. | I Putu Manik Miarta          | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama              | Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko |
| 14. | Arif Surahman                | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi           | Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA